



SURAT KABAR TERPOPULER
DAN PALING BANYAK DIBACA
DI JAWA TENGAH



SUARA MERDEKA

Perekat Komunitas Jawa Tengah

■ www.suaramerdeka.com ■ epaper.suaramerdeka.com



HARGA LANGGANAN

Rp. 89.000

KAMIS LEGI, 18 OKTOBER 2018

TAHUN 69 NO. 237 ■ TERBIT 28 HALAMAN

Jaringan Layanan Media Terlengkap di Jawa Tengah

Rp. 3.999

1

Ancaman Pemecatan Sarat Kepentingan Politik

■ Kenaikan UMP 2019

SEMARANG - Ancaman pemecatan kepala daerah yang tidak menaikkan UMP 2019 sebesar 8,03 % yang dinyatakan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dinilai sebagai gertak sambal. Pernyataan menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut justru dinilai memiliki kepentingan tertentu.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro Dr Teguh Yuwono mengatakan, seorang kepala daerah tidak bertanggungjawab pada menteri tapi pada presiden. Pada tataran menteri, mungkin hanya Mendagri yang berkaitan erat dengan kinerja

kepala daerah.

Sehingga ancaman pemecatan itu juga tak rasional. Jika toh nantinya ada kepala daerah tak menaikkan UMP sesuai instruksi menteri maka itu merupakan tataran kebijakan dan bukan pidana sehingga bisa dipecah.

"Itu bukan pernyataan rasional. Tapi lebih bernuansa kepentingan tertentu agar kepala daerah taat pada keputusan menteri," lanjut Teguh, semalam. Padahal, melihat prosedur dan aturannya, kepala daerah tak bisa diperintah begitu saja oleh menteri.

Apalagi hanya sebatas perin-

tah lisan. Mestinya, jika ingin aturan itu diterapkan di semua daerah maka dibuat aturan tertulis dan kalau perlu melalui perintah presiden. Maka kepala daerah mau tak mau harus melakukannya.

Dinilai Wajar

Namun demikian, keputusan pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03% dinilai masih wajar. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongi menilai, persentase kenaikan ini bisa diterima oleh seluruh jajaran Aprindo Jateng karena sudah sesuai dengan PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

(Bersambung hlm 7 kol 2)

Ancaman...

(Sambungan Hal 1)

Kenaikan ini juga dianggap masih cukup sehat dalam kondisi dunia usaha seperti sekarang ini. Meskipun nilai rupiah menurun terhadap dolar AS tetapi para pelaku usaha masih cukup optimistis dan berupaya melakukan terobosan-terobosan untuk efisiensi.

"Waktu rupiah mulai terdepresiasi kita sudah mengimbuai semua perusa-

haan untuk bekerja lebih efisien dengan penghematan bahan baku dan energi. Perlemahan rupiah ya memang ada pengaruhnya karena 70%-80% bahan baku masih harus diimpor," kata Frans, Rabu (17/10).

Frans menjelaskan, dengan kenaikan UMP ini tentu akan berimbas keuntungan para pengusaha sedikit turun. Kendati demikian, Apindo Jateng tetap mengharapkan seluruh perusahaan bisa melaksanakan keputusan gubernur nantinya.

Seandainya ada perusahaan yang nanti betul-betul mengalami kesulitan untuk merealisasikan, juga bisa mengajukan upaya penundaan.

"Kami berharap pengusaha bisa melaksanakan keputusan pemerintah dan apabila mengalami kendala atau kesulitan bisa meminta penangguhan atau penundaan pembayaran," terangnya.

Sementara itu, Ketua Apindo Kota Semarang Dedi Mulyadi Ali menambahkan, perkembangan kondisi ekonomi dinilai belum terlalu stabil sejak

awal tahun dan kurang begitu berkembang.

Namun ke depan pihaknya optimistis akan geliat usaha tumbuh lebih baik dan besaran kenaikan masih termasuk angka moderat sehingga bisa dilaksanakan.

"Dengan adanya ketentuan ini pemerintah juga sudah mengatur dan kita harapkan pengusaha bisa memenuhi untuk membayar sesuai arahan," ujar Dedi yang juga Sekretaris Apindo Jateng ini. (H81,J14-)